



SUMBER BERITA

RABU, 18 DESEMBER 2019

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejagung Dalam Dugaan Penyuapan

Polda Tunggu Laporan Amiruddin

BENGKULU - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr. Mukri SH, MH mengatakan pihaknya masih mendalami laporan PT Karya Dutamandiri Sejahtera selaku kontraktor pengerjaan proyek alun-alun Kota Bengkulu. Mereka masih mempelajari, apakah masuk ke ranah pemerasan atau masuk ke ranah penyuapan.

Menurut Mukri, tidak menutup kemungkinan tersebut akan diproses oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) apabila ditemukan tindak pidana pemerasannya. Seperti diketahui dalam laporannya Kuasa Direktur PT Karya Dutamandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza merasa diperas oleh oknum Konsultan Pengawas bernama Hendri, mantan Kadi PUPR kota Bengkulu dan PPK proyek alun-alun bernama Sabirin serta juga mengkait-kaitkan nama walikota Bengkulu Helmi Hasan.

Namun sebaliknya, apabila ditemukan tindak pidana penyuapan karena terjadi kesepakatan nominal uangnya, maka akan diproses oleh Jampidsus. "Kita masih telaah dahulu laporannya, nanti langkah selanjutnya masih kita tunggu dulu, karena perkara yang dilaporkan ini masih kita dalam," ungkapnya.

Nantinya dalam pengusutan perkara ini, Kejagung siap untuk menurunkan tim ke Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan sejumlah orang baik terlapor maupun pelapor. Namun bisa juga pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejati atau kejarri Bengkulu untuk pengusutannya sebagai perpanjangan tangan dari Kejagung.

"Bisa saja kita yang turun langsung

atau kita limpahkan ke Kejati atau kejarri, itu masih menunggu," lanjutnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu, AKBP Sudarno S.Sos MH mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menerima laporan terkait dugaan pemerasaan yang akan dilaporkan oleh Amiruddin Murtuza selaku Kuasa Direktur PT Karya Dutamandiri Sejahtera. Menurutnya semua laporan yang masuk ke Polda Bengkulu akan ditindaklanjuti. Ia pun menghimbau agar saat melaporkan hal tersebut, pelapor diharapkan langsung membawa sejumlah bukti-bukti terkait apa yang dilaporkannya. Hal itu dikarenakan Amirudin mengatakan bahwa dirinya berencana akan melaporkan dugaan pemerasan ke Polda Bengkulu pada hari ini. "Tentunya kami siap, semua laporan yang masuk tentunya akan ditindaklanjuti," tutupnya.

Amiruddin Murtuza mengatakan bahwa dirinya selain melaporkan ke Jampidsus juga berniat untuk melaporkan dugaan pemerasaan tersebut ke Polda Bengkulu. Dalam melaporkan hal itu, Aniruddin juga akan langsung membawa sejumlah bukti terkait penyerahan uang kepada sejumlah oknum yang dilaporkannya. Menurut informasinya, ia memegang sejumlah bukti penyerahan uang sebesar Rp 990 juta kepada beberapa nama. Hal itulah yang akan dibawanya saat melapor ke Polda Bengkulu.

"Saya siap melapor ke Polda Bengku-

lu dan menceritakan yang sebenarnya, saya juga akan membawa bukti-bukti," pungkasnya.

Sebelumnya PT Karya Dutamandiri Sejahtera selaku kontraktor pengerjaan proyek alun-alun Kota Bengkulu melaporankan beberapa oknum ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemarin (12/12). Laporan itu dilayangkan karena kontraktor merasa diperas oleh beberapa oknum konsultan pengawas yakni H.Endri selaku direktur utama PT Civarligma Engineering dan Maas Syabirin Taher selaku Kabid Cipta Karya atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang mengatansamakan Walikota Bengkulu dan yang lainnya.

Kuasa Direktur PT Karya Dutamandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza menjelaskan bahwa pemerasan itu bermula saat kontraktor mengajukan termin 50 persen sejak 40 hari yang lalu. Namun sampai sekarang, pihaknya tidak juga dibuatkan berita acara pembayaran dengan alasan konsultan dan PPK proyek belum mendapatkan sejumlah uang dari sang kontraktor.

"Kontraktor merasa diperas dan dirugikan oleh oknum konsultan dan PPK dengan mengatansamakan Walikota dan yang lainnya, totalnya sudah Rp 2 miliaran," ungkapnya. (cup)